

Recording
You are viewing Bahasa Global Monitor 1's screen
View Options

## Webinar Diseminasi Hasil Studi: Dampak COVID-19 terhadap Penyandang Disabilitas di Indonesia

Kamis, 12 Agustus 2021



**EMMY, S.PSI., MPH**  
GESI SPECIALIST, KOMPAK

### Alur Pendataan Penyandang Disabilitas

- Petugas pendataan dari Dinsos dan Kementerian ditempatkan di Kecamatan, Kabupaten, melakukan pendataan di Desa, data dilaporkan langsung ke Dinsos dan Kemensos
- Koordinasi dan sinkronisasi data kadang dilakukan dengan inisiatif Desa
- Desa menyediakan data saat diminta oleh Dinsos Kabupaten. Tapi selama ini Desa tidak pernah mendapatkan umpan balik atas data yang diberikan



11:49

## DAMPAK COVID-19 TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

Jakarta (12/8) – Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/ Bappenas mengadakan agenda diseminasi hasil studi yang bertajuk “Dampak COVID-19 terhadap Penyandang Disabilitas di Indonesia”. Studi ini merupakan hasil kolaborasi yang diprakarsai oleh MAHKOTA, KOMPAK, dan Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD), dengan dukungan dari pemerintah Australia, Kementerian PPN/Bappenas, dan koordinasi dengan Kementerian Sosial. Studi ini dilakukan secara kualitatif untuk memahami bagaimana penyandang disabilitas di Indonesia terdampak oleh pandemi COVID-19.

Jakarta (12/8) – The Directorate of Poverty Reduction and Community Empowerment, Ministry of National Development Planning/Bappenas held an agenda for disseminating the results of the study entitled "The Impact of COVID-19 on Persons with Disabilities in Indonesia". This study is the result of a collaboration initiated by MAHKOTA, KOMPAK, and the Network of Organizations for Persons with Disabilities (Organisasi Penyandang Disabilitas – hereinafter referred to OPD), supported by the Australian government, the Ministry of National Development Planning/Bappenas, and coordination with the Ministry of Social Affairs. This study was conducted qualitatively to understand how people with disabilities in Indonesia are affected by the COVID-19 pandemic.

Agenda ini dibuka oleh Bapak Maliki selaku Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas. Beliau memaparkan bahwa Indonesia saat ini menjadi negara dengan penambahan kemiskinan kronis tertinggi ketiga di dunia. Di dalamnya, terdapat beberapa kelompok yang membutuhkan perhatian utama selama pandemi, salah satunya adalah penyandang disabilitas. Dampak yang dialami penyandang disabilitas antara lain adalah pemutusan hak kerja (PHK), berkurangnya akses kesehatan, eksklusi sosial, menurunnya kualitas kesehatan mental, serta angka kematian yang lebih tinggi. Dari perkiraan jumlah total penyandang disabilitas, sebagian besar termasuk dalam usia produktif yang membutuhkan akses dan bantuan agar menjadi produktif. Oleh karena itu, Peraturan Menteri PPN/Bappenas diharapkan menjadi langkah konkrit dalam jangka waktu lima tahun, yang mana salah satu targetnya adalah pendataan menyeluruh terhadap penyandang disabilitas. Maka dari itu, studi yang dimulai dari jaringan OPD diharapkan dapat memperkuat strategi kebijakan yang inklusif dan tepat sasaran. Sambutan pembuka selanjutnya disampaikan oleh Kristen Bishop, Minister Counsellor Governance and Human Development, selaku perwakilan dari pemerintah Australia. Beliau menekankan pada pentingnya inklusi penyandang disabilitas dalam mencari strategi respon penanganan serta pemulihan dari pandemi. Oleh karena itu, hasil dari studi ini sangat penting bagi para pembuat kebijakan dan mitranya.

Diseminasi hasil studi dimulai oleh Ibu Sinta Satriana sebagai perwakilan dari MAHKOTA. Beliau menekankan bahwa pemahaman dampak COVID-19 terhadap penyandang disabilitas perlu dimulai dari memahami kerentanan penyandang disabilitas sebelum pandemi. Dengan mayoritas menekuni pekerjaan informal, pendapatan rendah, serta biaya hidup yang tinggi, penyandang

This agenda was opened by Mr. Maliki as Director of Poverty Reduction and Community Empowerment, Ministry of National Development Planning/Bappenas. He explained that Indonesia is currently a country with the third highest increase in chronic poverty in the world. Thus, there are several groups that need main attention during the pandemic, one of which is people with disabilities. The impacts experienced by persons with disabilities include termination of employment rights, reduced access to health, social exclusion, decreased quality of mental health, and higher mortality rates. Among the estimated total number of persons with disabilities, most are in the productive age who need access and assistance to be productive. Therefore, the Regulation of the Minister of National Development Planning/Bappenas is expected to be a concrete step within a period of five years, of which one of the targets is a comprehensive data collection of persons with disabilities. Therefore, studies starting from the OPD network are expected to strengthen an inclusive and well-targeted policy strategy. The opening remarks were then delivered by Kristen Bishop, Minister Counsellor Governance and Human Development, as a representative of the Australian government. She emphasized the importance of the inclusion of persons with disabilities in seeking response strategies for pandemic handling and recovery. Therefore, the results of this study are very important for policy makers and their partners.

Dissemination of the study results was explained by Mrs. Sinta Satriana as a representative from MAHKOTA. She emphasized that understanding the impact of COVID-19 on people with disabilities needs to start from understanding the vulnerability of people with disabilities before the pandemic. With the majority in informal jobs, low incomes, and high costs of living, people with

disabilitas lebih terpengaruh saat terjadi pandemic dibanding kelompok lainnya.

Dari segi ekonomi, sebanyak 81% penyandang disabilitas merasakan penurunan pendapatan yang besar, dan lebih dari setengahnya telah masuk ke bawah garis kemiskinan. Coping strategy dari permasalahan ini juga banyak yang berdampak buruk, seperti pengurangan asupan makan dan nutrisi, serta peminjaman uang yang kerap berujung kepada keterlilitan hutang. Dampak di aspek kesehatan juga dialami secara signifikan bagi penyandang disabilitas seperti layanan kesehatan yang terganggu selama pandemi karena penyandang disabilitas tidak berkunjung ke klinik. Penambahan stigma sosial serta menurunnya fasilitas kesehatan di pusat rehabilitasi juga menimbulkan gangguan psikososial. Di aspek ketenagakerjaan, pekerja dengan disabilitas lebih terdampak karena lebih rentan akan kehilangan pekerjaan. Hal ini juga mengakibatkan meningkatnya kesenjangan pendidikan. Cakupan program ketenagakerjaan yang ada juga kurang menysasar pada penyandang disabilitas.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sejauh ini dinilai telah meingkatkan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas. Selain subsidi listrik, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), memiliki cakupan terkhusus untuk penyandang disabilitas. Studi juga mendapatkan bahwa bantuan tunai lebih bermanfaat dibanding bantuan berbentuk barang. Selain jumlah yang cukup signifikan, bantuan tunai juga lebih cocok untuk kebutuhan penyandang disabilitas yang berbeda-beda. Dalam konteks pandemi, uang tunai meminimalisir kerumunan serta kontak fisik. Peredaran uang tunai di masyarakat juga menstimulasi kegiatan ekonomi.

disabilities are more affected during a pandemic than other groups.

From an economic perspective, as many as 81% of people with disabilities have experienced a large decline in income, and more than half have fallen below the poverty line. Coping strategies from this problem also have many negative impacts, such as reducing food intake and nutrition, as well as borrowing money which often leads to debt entanglements. The impact on the health aspect is also experienced significantly by people with disabilities such as health services being disrupted during the pandemic because people with disabilities do not visit the health clinic. The addition of social stigma and the decline in health facilities in rehabilitation centers also cause psychosocial disorders. In the employment aspect, workers with disabilities are more affected because they are more vulnerable to losing their jobs. This has also resulted in an increase in educational disparities. The scope of existing employment programs also does not target persons with disabilities.

So far, the National Economic Recovery Program (Pemulihan Ekonomi Nasional - PEN) is considered to have improved social protection for persons with disabilities. In addition to electricity subsidies, Cash Social Assistance (BST), and Village Fund Direct Cash Assistance (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa - BLT-DD), have special coverage for persons with disabilities. The study also found that cash assistance was more beneficial than in-kind assistance. Apart from being a significant amount, cash transfers are also more suitable for the different needs of persons with disabilities. In the context of a pandemic, cash minimizes crowds and physical contact. The circulation of cash in the community also stimulates economic activity.

Beliau juga menekankan pentingnya data yang terpilah antara DTKS dan database penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan DTKS hanya mencakup penyandang disabilitas dari keluarga miskin. Selain itu, DTKS hanya berbasis keluarga bukan individu. Pembelajaran dari studi yang dapat diambil adalah: perlunya perluasan cakupan perlindungan sosial, perlindungan sosial terbukti merangsang ekonomi dan melindungi kelompok rentan, data yang hanya berbasis kemiskinan tidak menjangkau kelompok beresiko atau 'orang miskin baru', mekanisme yang community-targeting dan pendaftaran mandiri terbukti meningkatkan inklusi, serta BLT terbukti bermanfaat.

Agenda dilanjutkan dengan paparan dari Ibu Emmy selaku perwakilan dari KOMPAK. Beliau menjelaskan pentingnya peran dari desa sebagai garda terdepan di tahap pendataan. Hal ini dikarenakan ketersediaan informasi lengkap mengenai KPM (Keluarga Penerima Manfaat) bansos hanya tersedia di tingkat desa. Maka dari itu, desa merupakan juru kunci dalam menyalurkan bansos serta mendeteksi penyaluran bansos yang tidak akurat. BLT-DD juga memungkinkan desa untuk menjangkau penyandang disabilitas yang tereklusi dari program bansos. Hal ini dapat membantu penyandang disabilitas yang memiliki posisi tawar yang lemah dalam keluarga yang sering mengakibatkan mereka tidak diprioritaskan dalam alokasi sumber daya. Namun, kemampuan dan wewenang desa yang terbatas dalam memperbaiki eksklusi penyandang disabilitas menjadi halangan. Sehingga bansos yang tidak dapat tersalurkan akhirnya dikembalikan ke pusat. Selain itu, penggunaan Sistem Informasi Desa (SID) dapat meningkatkan cakupan bansos. Dalam hal ini, diperlukan pedoman standar untuk implementasi.

She also emphasized the importance of disaggregated data between DTKS and the database of persons with disabilities. This is because DTKS only covers persons with disabilities from poor families. In addition, DTKS is only family based, not individual. The lessons learned from the study are: the need to expand social protection coverage, social protection is proven to stimulate the economy and protect vulnerable groups, poverty-based data does not reach at-risk groups or the 'new poor', community-targeting mechanisms, self-registration are proven increase inclusion, and BLT (Bantuan Langsung Tunai - BLT) has proven to be beneficial.

The agenda was followed by a presentation from Mrs. Emmy as a representative from KOMPAK. She explained the importance of the village role as the front line in the data collection stage. This is because the availability of complete information on social assistance recipients is only available at the village level. Therefore, the village is the caretaker in distributing social assistance and detecting inaccurate distribution of social assistance. BLT-DD also allows villages to reach persons with disabilities who are excluded from the social assistance program. This can help people with disabilities who have a weak bargaining position in the family which often results in them not being prioritized in resource allocation. However, the limited capacity and authority of the village in improving the exclusion of persons with disabilities is an obstacle. Thus, social assistance that cannot be distributed is finally returned to the center. In addition, the use of the Village Information System (Sistem Informasi Desa - SID) can increase the coverage of social assistance. In this case, standard guidelines for implementation are required.

Paparan selanjutnya disampaikan oleh Ibu Nurul Saadah Andriani yang mewakili Jaringan OPD. Beliau menekankan peran penting dari JOPD dalam membantu layanan kesehatan, penyediaan informasi, serta penyaluran bansos. Namun, saat ini tantangan yang dihadapi OPD antara lain keberadaan JPOD yang masih sporadic dan belum terlembaga secara konsisten. Selain itu, cakupan wilayah yang belum luas serta mekanisme pelibatan yang belum sensitive juga menjadi tantangan dari OPD. Ibu Nurul juga menjelaskan urgensi dari pelibatan OPD dalam menyusun strategi pemulihan tepat bagi penyandang disabilitas karena OPD adalah elemen yang mengerti benar tentang situasi dan kebutuhan penyandang disabilitas. OPD telah mendampingi penyandang disabilitas jauh sebelum pandemi melanda. Kehadiran OPD juga memperkuat pengembangan sistem dukungan untuk penyandang disabilitas berbasis komunitas dari tingkat terendah.

Setelah pemaparan hasil studi, kementerian terkait menyampaikan tanggapan mereka. Tanggapan pertama disampaikan oleh Ibu Eppy Lugiarti selaku perwakilan dari Kementerian Desa PDTT. Beliau menyampaikan bahwa di tahun 2020, KPM dari BLT-DD memiliki tiga syarat, yaitu keluarga miskin terdampak, keluarga miskin yang tidak terdata di DTKS, dan keluarga yang terdata di DTKS namun belum mendoatkan bansos apapun. Beliau juga menyampaikan bahwa BLT-DD ditargetkan sebagai salah satu program pemulihan COVID-19. Beliau juga mengharapkan jumlah KPM meningkat setidaknya sebanyak delapan juta KPM di tahun 2020. Hal ini menjadi peluang bagi para mitra untuk memfasilitasi perangkat desa. Tanggapan selanjutnya disampaikan oleh Bapak Heri Kris Sritanto dari Kementerian Sosial. Beliau menyampaikan mengenai penyesuaian anggaran yang dibutuhkan dalam perubahan pembatasan

The next presentation was delivered by Mrs. Nurul Saadah Andriani who represented the OPD Network. She emphasized the important role of OPD Network in assisting health services, providing information, and distributing social assistance. However, currently the challenges faced by OPD include the sporadic existence of OPD which has not been consistently institutionalized. In addition, the limited scope of the area and the insensitive mechanism of engagement is also a challenge for the OPD. Mrs. Nurul also explained the urgency of involving OPD in formulating the right recovery strategy for persons with disabilities because OPD is an element that truly understands the situation and needs of persons with disabilities. OPD has been accompanying people with disabilities long before the pandemic hit. The presence of OPD also strengthens the development of a community-based support system for person with disabilities from the lowest level.

After the presentation of the study results, the relevant ministries conveyed their responses. The first response was delivered by Mrs. Eppy Lugiarti as a representative of the Ministry of Villages of PDTT. She said that in 2020, Beneficiary Family (Keluarga Penerima Manfaat – hereinafter referred to KPM) from BLT-DD had three conditions, namely poor affected families, poor families who were not registered at DTKS, and families registered at DTKS but had not received any social assistance. She also said that BLT-DD was targeted as one of the COVID-19 recovery programs. She expects the number of KPM to increase by at least eight million KPM in 2020. This is an opportunity for partners to facilitate village officials. The next response was delivered by Mr. Heri Kris Sritanto from the Ministry of Social Affairs. He conveyed about the needs to adjust budget to change the limitation of persons



penyandang disabilitas menjadi lebih dari satu orang per keluarga. Beliau menekankan bahwa hal ini sangat memungkinkan untuk dilakukan. Selain itu, belum terpenuhinya bantuan kepada kategori penyandang disabilitas berat juga perlu dibarengi dengan meningkatkan peran dari pemerintah daerah dan OPD.

Berikutnya, perwakilan dari Kementerian PPA, Ibu Valentina Gintings, menyampaikan urgensi pemahaman strategi respon yang tepat khususnya bagi penyandang disabilitas perempuan dan anak. Hal ini dikarenakan penyandang disabilitas anak masih sangat bergantung pada pendamping yang seringkali belum menyampaikan informasi yang jelas mengenai pencegahan dan penanganan pandemi. Kerentanan perempuan dan anak berbeda dari kelompok lainnya, maka dari itu mereka harus menjadi subjek yang utama dalam penyaluran bansos. Selain itu, beliau juga menekankan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak selama pandemi. Sebagai solusinya, KPPA membuka hotline pengaduan dan layanan, serta panduan perlindungan yang terkhusus bagi perempuan dan anak. Tanggapan yang terakhir disampaikan oleh Bapak Antoni Saputra, selaku perwakilan dari Bappeda Kota Padang. Beliau menekankan bahwa perlunya peraturan Menteri terkait data terpilah agar mekanisme pendataan menjadi lebih komprehensif. Selain itu, beliau mengharapkan tersedianya mekanisme yang jelas dari OPD terkait perencanaan implementasi program yang ada, serta penguatan kapasitas perangkat daerah untuk memastikan keselarasan data.

with disabilities to more than one person per family. He stressed that this is very possible to do. In addition, the unfulfilled assistance to the category of people with severe disabilities also needs to be accompanied by increasing the role of local governments and OPD.

Next, a representative from the Ministry of PPA, Ms. Valentina Gintings, conveyed the urgency of understanding the right response strategy, especially for women and children with disabilities. This is because children with disabilities are still very dependent on assistants who often do not convey clear information regarding the prevention and handling of the pandemic. The vulnerability of women and children is different from other groups, therefore they must be the main subject in the distribution of social assistance. In addition, she emphasized the high rate of violence against women and children during the pandemic. As a solution, KPPA has opened a hotline for complaints and services, as well as guidance on protection specifically for women and children. The last response was delivered by Mr. Antoni Saputra, as a representative of the Padang City Regional Development Planning Agency. He emphasized that there is a need for a Ministerial regulation on disaggregated data so that the data collection mechanism becomes more comprehensive. In addition, he expects the availability of a clear mechanism from the OPD regarding the planning to implement some existing programs, as well as the capacity strengthening of regional apparatus to ensure data alignment.